

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu kendala yang dihadapi semua negara. Di negara maju dan berkembang, kemiskinan telah lama menjadi masalah terdalam dan tersulit di dunia (Ishartono, 2016). Selanjutnya kemiskinan merupakan masalah global, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan bukanlah hal baru di Indonesia yang merupakan anggota negara ASEAN dan di kategorikan negara berkembang. Hampir semua pemerintah Indonesia memandang kemiskinan sebagai masalah pembangunan. Efisiensi merupakan faktor terpenting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dalam strategi pemilihan alat dan pembangunan ekonomi (Suhandi dkk, 2018).

Salah satu inisiatif yang dilakukan hampir setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat adalah Rencana Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan SDG's memprioritaskan karakteristik dan prioritas nasional dan didasarkan pada pendekatan dan strategi yang komprehensif antara pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial, dan kelestarian lingkungan (Panuluh dan Fitri, 2016).

Sustainable Development Goals disingkat *SGS*, memiliki 17 tujuan dengan 169 hasil dan tenggat waktu terukur, yang disebut-sebut oleh PBB sebagai rencana pembangunan global untuk manusia dan planet sebagai tujuan pembangunan bersama untuk tahun 2020. Indonesia telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sejak diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada September 2015. Pemerintah berkontribusi yang kuat dan tindakan yang tepat waktu, termasuk

sejumlah tujuan dalam indikator SDG dari Rencana Pembangunan Nasional. Dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan global, tujuan pertama adalah mengakhiri kemiskinan dan tak ada kemiskinan global (Ishartono, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu dipecahkan.

Meskipun masalah kemiskinan di negara-negara berkembang sulit untuk dipecahkan, sebagian besar negara-negara tersebut telah mencapai pertumbuhan ekonomi berkat produktivitas yang tinggi dan peningkatan pendapatan, tetapi pada saat yang sama kesenjangan antara kaya dan miskin melebar dan pendapatan meningkat. Meningkatkan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dengan meningkatnya kemiskinan relatif (Sartika, 2016).

Kemiskinan di Indonesia adalah perkara kompleks yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah melakukan beberapa program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi, mencapai 25,14 juta jiwa (9,41%) pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019).

Persoalan strategis yang ada Di Provinsi Gorontalo cenderung sama dengan persoalan yang ada di tingkat nasional, yaitu persoalan kemiskinan yang masih relatif tinggi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai penyangga dalam proses perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Pemerintah memiliki tanggung jawab mencari jalan keluar dan merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan.

Regional Gorontalo merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia jika di lihat dari provinsi (Rofi'i, 2021). Pada tahun 2019, Kabupaten Boalemo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 18.87 persen, diikuti oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 18,16 persen. Kemiskinan merupakan bencana yang dapat memperlambat pembangunan ekonomi daerah, dan merupakan konflik yang harus diselesaikan oleh Pemerintah regional Gorontalo karena pemerintah diklaim telah gagal mengembangkan perekonomian daerah jika kemiskinan secara terus menerus mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

**Tabel 1. 1 Persentasi Penduduk Miskin
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020 (Persen)**

Tahun	Gorontalo	Boalemo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2011	21.31	21.90	21.56	17.39	19.22	5.97	18.02
2012	20.79	20.42	20.18	16.67	18.54	5.61	17.22
2013	21.57	21.79	21.47	17.19	19.16	5.99	18.00
2014	21.05	20.79	20.69	16.68	18.34	5.85	17.41
2015	23.80	21.67	22.43	18.49	18.93	6.05	18.32
2016	21.03	21.11	21.17	17.97	18.51	6.05	17.72
2017	20.55	21.85	21.27	17.81	19.27	5.70	17.65
2018	19.84	20.33	19.04	17.04	18.54	5.57	16.81
2019	18.06	18.87	18.16	16.12	16.95	5.45	15.52
2020	17.56	18.67	17.62	15.81	16.88	5.59	15.22

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2020

Tabel 1.1 diatas menjelaskan tingkat kemiskinan pada 6 (enam) kabupaten/kota Di Provinsi Gorontalo masih tidak merata dan sebagian besar kemiskinannya masih tinggi dan hanya Kota Gorontalo yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10 persen. Hal ini tidak berarti bahwa kemiskinan di Gorontalo telah menurun secara signifikan, tetapi angka kemiskinan masih tinggi dan berada di atas garis kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun provinsi harus mampu melaksanakan program penanggulangan

kemiskinan khususnya di Gorontalo. Pemerintah Gorontalo harus menggunakan segala cara untuk mengurangi kemiskinan di wilayah Gorontalo, yang dapat mengurangi kemiskinan, sekaligus memperbaiki situasi kemiskinan negara yang tinggi.

Masalah kemiskinan ini bisa dipengaruhi pencapaian beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Lonjakan populasi menyebabkan masalah kesejahteraan dan pembangunan yang serius, dan ketika banyak yang tidak dikompensasi dengan bantuan keuangan yang tinggi, mereka menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan nasional secara umum, di antara masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta merekrut talenta-talenta unggulan. (Sukirno, 2011). Berikut tabel pertumbuhan penduduk Di Provinsi Gorontalo:

**Tabel 1. 2 Pertumbuhan Penduduk
Di Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2011-2020 (Persen)**

Tahun	Gorontalo	Boalemo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2011	0.76	2.87	2.57	1.43	1.26	2.32	1.66
2012	1.68	2.68	2.53	2.02	1.88	2.37	2.09
2013	0.80	2.88	2.55	1.48	1.12	2.29	1.67
2014	0.62	2.92	2.48	1.37	1.09	2.13	1.57
2015	2.88	0.73	2.55	1.45	1.14	2.24	1.64
2016	0.68	2.88	2.50	1.42	1.12	2.20	1.61
2017	0.69	2.86	2.50	1.41	1.10	2.30	1.51
2018	0.64	2.83	2.48	1.39	1.08	1.18	1.59
2019	0.39	2.74	2.43	1.28	0.91	2.01	1.48
2020	0.96	1.18	1.29	1.34	1.78	0.95	1.16

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2020

Tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa angka pertumbuhan penduduk masih mengalami fluktuatif yaitu tingkat pertumbuhan penduduk masih naik turun, Seperti terlihat pada tahun 2013 sampai tahun 2019 dimana angkanya tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1.16 persen dan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 2.09 persen. Wilayah Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan penduduk regional/perkotaan paling rendah. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (Istanto, 2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menilai kinerja ekonomi, terutama dalam menganalisis hasil pembangunan ekonomi nasional atau daerah. Perekonomian diperkirakan akan tumbuh dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya produksi barang dan jasa. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan suatu periode di mana kegiatan ekonomi dapat membawa lebih banyak pendapatan atau kekayaan orang dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang stabil dan pesat berarti perekonomian suatu negara atau wilayah berkembang dengan baik. (Agustina, 2010).

**Tabel 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020 (Persen)**

Tahun	Gorontalo	Boalemo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
2011	7.7	6.7	7.1	6.9	7.0	7.8	7.7
2012	7.7	7.4	7.5	3.5	7.1	7.9	7.9
2013	7.7	7.5	7.7	7.6	7.2	7.9	7.7
2014	7.8	7.3	7.3	7.7	7.2	7.9	7.3
2015	6.3	6.4	6.1	6.5	7.3	7.2	6.2
2016	6.6	6.3	6.6	6.6	7.4	7.4	6.5
2017	6.8	6.7	6.8	7.1	7.4	7.4	6.7
2018	6.2	6.7	6.5	6.5	6.9	7.0	6.5
2019	6.2	6.7	6.3	6.4	6.8	7.0	6.2
2020	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2020

Tabel 1.3 diatas menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi 6 (enam) Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan angka yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar -0.02 persen dan angka tertinggi berada pada tahun 2012 yaitu sebesar 7.91 persen dan pada tahun 2017 sampai 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi masih tidak merata yaitu sebesar 7.91 persen dan 6.21 persen Dan untuk Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota tertinggi berada pada Kota Gorontalo. Untuk hal ini berarti dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan cenderung meningkat.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi bersifat positif karena semakin banyak penduduk merupakan faktor pertumbuhan maka perekonomian tumbuh, tetapi sebaliknya penurunan penduduk menyebabkan kemunduran dan menjadi sulit upaya yang dapat di ambil yaitu dengan mengembangkan ekonomi dan menurunkan tingkat Kemiskinan. Berdasarkan rincian dan jumlah data yang tersedia, peneliti akan mempelajari bagaimana

penduduk dan pembangunan ekonomi mempengaruhi Tingkat kemiskinan di Gorontalo sesuai dengan judul skripsi : **“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran umum yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah. Fokus pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada poin sebelumnya dapat di ketahui tujuan penelitian menitik beratkan pada, Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan baik dalam acuan pertumbuhan ataupun acuan untuk menentukan kebijakan ataupun penelitian yang akan dilakukan pembaca selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah sekaligus memberikan referensi untuk dijadikan solusi dalam menurunkan angka kemiskinan.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran situasi ekonomi saat ini agar dapat lebih menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat.